



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj - IP) TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai selama tahun 2022 sesuai dengan perencanaan strategis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Data kinerja yang disampaikan diupayakan dapat memberikan informasi kinerja yang objektif dan dapat mendukung perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritikan dan saran demi perbaikan laporan ini sangat kami harapkan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai atas partisipasi dan kerjasama yang baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kota Dumai.

Dumai, 31 Januari 2023

Kepala



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategis	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Dasar Hukum	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Organisasi	35
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini...	36
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian.....	
kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021).....	37
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini.....	
(2022) dengan target jangka menengah yang terdapat	
dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	41
4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau.....	
peningkatan/ penurunan kinerja atau permasalahan dan	
alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41
5. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan....	
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	60

Lampiran :

- ~ Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ~ Rencana Aksi dari Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ~ Rencana Kinerja Tahunan dari Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ~ Evaluasi Berkala Rencana Aksi dari Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- ~ Indikator Kinerja Utama (IKU)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Proporsi Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022	5
Tabel 1.2 Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	6
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	7
Tabel 1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022	7
Tabel 1.5 Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Jabatan Struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	8
Tabel 1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Pangkat dan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	9
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026	16
Tabel 2.2 Sasaran Prioritas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026.....	18
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022....	22
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022	24
Tabel 2.5 Rencana Aksi dari Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas..... Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota..... Dumai Tahun 2022.....	29
Tabel 2.6 Evaluasi Berkala Capaian Indikator Sasaran Dinas	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota..... Dumai Tahun 2022.....	30

Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota..... Dumai Tahun 2022.....	31
Tabel 3.1 Tabel Indikator Kinerja Sasaran Strategis Beserta Target dan... Realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan.. Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	35
Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan... dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022.....	36
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan..... Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun..... Anggaran 2022.....	59

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar di Kota Dumai Periode Tahun 2018 s/d 2022.....	38
Grafik 3.2 Skor Pencapaian Kota Layak Anak Kota Dumai Periode Tahun 2018 s/d 2022	39
Grafik 3.3 Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai Periode Tahun 2020 s/d 2022	40

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tersebut maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang di dalamnya berisi konstelasi perencanaan strategi dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

C. ISU STRATEGIS

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai saat ini perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan Visi dan Misi yang ada. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintahan.

Berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang telah disepakati serta hasil evaluasi pencapaian target-target pembangunan ditinjau dari administrasi pemerintahan yang mengacu pada isu-isu strategis pembangunan Kota Dumai selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kota Dumai
2. Belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran responsive gender (PPRG) di Kota Dumai
3. Belum maksimalnya pelaksanaan data gender dan anak di Kota Dumai
4. Belum optimalnya pelayanan publik karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah

5. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan
6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Dumai No. 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh beberapa jajaran struktural. Namun dengan adanya penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 serta dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 905 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional sehingga dalam pelaksanaan sehari-harinya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dibantu oleh jajaran structural dan jajaran fungsional seperti di bawah ini :

1. **Sekretariat**, terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
2. **Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga**, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
3. **Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak**, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. **Bidang Perlindungan Hak Perempuan**, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak, terdiri dari:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPT PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPT PPA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fungsi UPT PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. Pengaduan masyarakat
- b. Penjangkauan korban
- c. Pengelolaan kasus
- d. Penampungan sementara
- e. Mediasi dan
- f. Pendampingan korban

UPT PPA merupakan UPT generik yang dalam prinsip pembentukannya berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis. Kebijakan pembentukan UPT PPA sebagai penyedia layanan perlindungan bagi perempuan dan anak telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPT PPA. Pembentukan UPT PPA Kota Dumai ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didukung dengan sumber daya manusia

sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang diperlihatkan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1.1 PROPORSI JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 orang	5,56	32 orang	62,75	33 orang	47,83
2.	Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK)	17 orang	94,44	19 orang	37,25	36 orang	52,17
TOTAL		18 orang	100,00	51 orang	100,00	69 orang	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari data di atas menunjukkan bahwa proporsi pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai didominasi oleh tenaga kerja dengan perjanjian kontrak (TKPK) sebanyak 36 orang dari jumlah seluruh pegawai yaitu 69 orang atau 52,17%. Tenaga Kerja Perjanjian Kontrak (TKPK) terdiri dari tenaga psikolog 1 orang, tenaga pendamping/ penyuluh 12 orang, tenaga administrator 11 orang, tenaga kebersihan 4 orang, tenaga keamanan 6 orang, dan tenaga supir 2 orang.

Adapun proporsi jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 1.2 PROPORSI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	%
		Laki-laki	%	Perempuan	%		
1.	20 s/d 30 tahun	7	38,89	15	29,41	22	31,88
2.	≥ 30 s/d 40 tahun	6	33,33	8	15,69	14	20,29
3.	≥ 40 s/d 50 tahun	3	16,67	17	33,33	20	28,99
4.	≥ 50 s/d 65 tahun	2	11,11	11	21,57	13	18,84
TOTAL		18	100,00	51	100,00	69	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada kelompok umur antara 20 s/d 30 tahun yaitu sebanyak 22 orang atau 31,88%, dan kelompok umur terkecil berada pada usia ≥ 50 s/d 65 tahun sebanyak 13 orang atau 18,84%. Dari seluruh kelompok umur tersebut didominasi oleh pegawai perempuan sebanyak 51 orang dari jumlah seluruh pegawai yang ada yaitu 69 orang atau sebesar 73,91%. Melihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berada pada kelompok usia produktif. Hal ini dapat menjadi factor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2022 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang yang dibagi berdasarkan :

1. Tingkat Pendidikan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. 3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase	Keterangan
1.	Strata II	6 Orang	18,18	
2.	Strata I	24 Orang	72,73	
3.	Diploma III	3 Orang	9,09	
Jumlah		33 Orang	100,00	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 memiliki pendidikan Strata I sebanyak 24 orang atau 72,73% dan tingkat pendidikan terendah adalah Diploma III sebanyak 3 orang atau 9,09%.

2. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

TABEL 1. 4. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
I.	Jabatan Struktural	1 Orang	8 Orang	9 Orang	27,27
II.	Jabatan Fungsional Tertentu (Penyetaraan)	0 Orang	14 Orang	14 Orang	42,42
III.	Jabatan Fungsional Umum	0 Orang	10 Orang	10 Orang	30,30
Total		1 Orang	32 Orang	33 Orang	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Data pada tabel 1. 4 menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 yang memegang jabatan baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebanyak 32 orang atau 96,97%.

Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini :

TABEL 1. 5. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
I.	Jabatan Struktural :			
a.	Esselon II b	0	1 Orang	1 Orang
b.	Esselon III a	0	1 Orang	1 Orang
c.	Esselon III b	1 Orang	3 Orang	4 Orang
d.	Esselon IV a	0	2 Orang	2 Orang
e.	Esselon IV b	0	1 Orang	1 Orang
	Total	1 Orang	8 Orang	9 Orang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

3. Pangkat dan Golongan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan pangkat dan golongan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini :

TABEL 1. 6. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Jabatan	Golongan Ruang	Jumlah	%
I.	Pembina Tk. I	IV/b	3	9,09
II.	Pembina	IV/a	5	15,15
III.	Penata Tingkat I	III/d	15	45,46
IV.	Penata	III/c	4	12,12
V.	Penata Muda Tingkat I	III/b	5	15,15
VI.	Penata Muda	III/a	1	3,03
J U M L A H			33 Orang	100,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 terbanyak berada pada pangkat Penata Tingkat I dengan golongan ruang III/d sebanyak 15 orang atau 45,46%.

E. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun

2022 dengan memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang melandasinya yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026;

11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 22 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A Noreg .48.A/2022);

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan yang ada serta mengantisipasi perubahan yang terjadi.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai disusun mengacu pada Visi Pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2022-2026.

Maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk merealisasikan hal tersebut melalui Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada, mengingat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kota Dumai, maka sepenuhnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung visi dari Pemerintah Kota Dumai yang ingin diwujudkan pada Tahun 2022 yaitu :

***"Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan
dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada
Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman) "***

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- 1) Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.
- 2) Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Dumai, akan senantiasa menjadi pendukung Pemerintah Kota Dumai untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dalam mewujudkan Misi Pemerintah Kota Dumai. Hal ini karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai merupakan Perangkat Daerah pelaksana penanganan kekerasan perempuan dan anak serta perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Dumai, terutama erat kaitannya dengan **Strategi** untuk meningkatkan sumber daya manusia daerah, dengan penekanan pada:

***Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat
yang merata dan berkualitas***

2. Misi

Terwujudnya visi sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sebagai bentuk nyata dari visi di atas maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Dumai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan tampak lebih nyata pada misi tersebut.

Lebih jauh, pernyataan misi Pemerintah Kota Dumai memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung misi ke 2 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu.

Misi ini mengandung makna bahwa **“peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan”**.

Hal ini disadari karena manusia sebagai objek dan subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional dan berdaya saing global. Melalui misi tersebut kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai harus dilaksanakan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai setiap tahunnya.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan kondisi 5 (lima) tahun ke depan sebagai bagian dari upaya pencapaian Visi dan Misi, konsisten tugas pokok dan fungsi, maka Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah berhasil mengidentifikasi tujuan sebagai berikut :

DUKUNGAN MISI	TUJUAN
Dua	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun sesuai misi Pemerintah Kota Dumai yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu :

“Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan”

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun seperti yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

**TABEL 2.1 SASARAN STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu Sasaran strategis: Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart)	91	95	95	95	95	95	95
	Skor Pencapaian Kota Layak Anak	650	700	750	800	850	900	900
	Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	2512	3187	3862	3870	4000	4300	4300

5. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarah kepada visi dan misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan.

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah/ upaya-upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun strategi untuk pencapaian sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu

Strategi :

- a. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- c. Terwujudnya Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak.

6. Kebijakan

Disamping sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, juga ada kebijakan yang akan ditempuh dan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya keterpaduan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan serta Visi dan Misi Organisasi.

Rumusan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai berfungsi sebagai instrumen pengelolaan dan pengaturan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
2. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
3. Mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Layak Anak

7. Program untuk Pencapaian Sasaran, Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran Proritas Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 2.2 SASARAN PRIORITAS PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran Prioritas Program SKPD	Jumlah Program
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.	6

Berdasarkan tabel di atas, sasaran meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak, jumlah program yang mencakup dalam sasaran tersebut ada 6 yaitu :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan yang terdiri dari :
 - Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota
 - 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - 3) Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

- 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / kota
 - 3) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota
- 2. Program perlindungan perempuan yang terdiri dari :
 - Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota
 - 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten / kota
 - Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota
 - Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain:
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota

- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota
 - 3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota
3. Program peningkatan kualitas keluarga yang terdiri dari:
- Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (kg) dan hak anak tingkat daerah kabupaten / kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kg dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/ kota
 - 2) Pelaksanaan komunikasi informasi dan edukasi kie dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/ kota
 - 3) Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten / kota
 - Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten / kota dengan sub kegiatan:
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota
 - 2) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota
 - 3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten / kota
4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak yang terdiri dari :
- Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota
 - 2) Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota

5. Program pemenuhan hak anak (PHA) yang terdiri dari:

- Kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten / kota
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota
 - 2) Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota
 - 3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota

6. Program perlindungan khusus anak yang terdiri dari:

- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota
- Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan antara lain :
 - 1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota

- 3) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
 - 4) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten / kota
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
- 1) Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota

Berikut rencana kinerja tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 sebagai berikut:

TABEL 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022
1	2	3	4	5
	<p>Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu</p> <p>Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan</p>	<p>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standart</p> <p>Skor Pencapaian Kota Layak Anak</p> <p>Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)</p>	<p>%</p> <p>skor</p> <p>skor</p>	<p>95</p> <p>700</p> <p>3187</p>

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Berikut merupakan gambaran keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 2.4 di bawah ini:

TABEL 2.4 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	<p>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	95%	<p>Program perlindungan perempuan terdiri dari:</p> <p>1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>2. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota</p>	<p>438,133,950,-</p> <p>72,100,000,-</p> <p>72,100,000,-</p> <p>349,044,000,-</p> <p>349,044,000,-</p>

				3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota	16,989,950,-
				a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	16,989,950,-
				Program perlindungan khusus anak terdiri dari:	190,663,500,-
				1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	78,350,000,-
				a. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	78,350,000,-
				2. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	10,007,500,-
				a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	10,007,500,-
				3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan	102,306,000,-

		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	700	<p>perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota</p> <p>Program pemenuhan hak anak (PHA) terdiri dari:</p> <p>1. Kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>2. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>b. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota</p>	<p>102,306,000,-</p> <p>50,999,400,-</p> <p>10,389,000,-</p> <p>10,389,000,-</p> <p>40,610,400,-</p> <p>14,235,400,-</p> <p>9,267,400,-</p> <p>17,107,600,-</p>
--	--	---------------------------------	-----	---	---

		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	3187	<p>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:</p> <p>1. Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>b. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pug termasuk PPRG</p> <p>2. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</p> <p>3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:</p>	<p>277,799,900,-</p> <p>67,267,400,-</p> <p>64,223,000,-</p> <p>3,044,400,-</p> <p>122,426,200,-</p> <p>122,426,200,-</p> <p>88,106,300,-</p> <p>88,106,300,-</p> <p>16,898,800,-</p>
--	--	--	------	---	---

				1. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	16,898,800,-
				a. Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/ kota	8,822,400,-
				b. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota	8,076,400,-

**TABEL 2.5 RENCANA AKSI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Target 2022
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa diri melayu</p> <p>Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	<p>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart</p> <p>Skor pencapaian kota layak anak</p> <p>Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)</p>	<p>%</p> <p>Skor</p> <p>Skor</p>	<p>95</p> <p></p> <p></p>	<p>95</p> <p>700</p> <p></p>	<p>95</p> <p></p> <p></p>	<p>95</p> <p></p> <p>3187</p>	<p>95</p> <p>700</p> <p>3187</p>

TABEL 2.6 EVALUASI BERKALA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Target 2022	Realisasi				Realisasi 2022 (%)
			Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	95	95	95	95	95	100	100	100	100	105,3
		Skor pencapaian kota layak anak		700			700		703,5			100,5
		Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)					3187				3862.5	121,2

TABEL 2.7 ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Anggaran
1	2	3	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	<p>Program perlindungan perempuan terdiri dari:</p> <p>1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>2. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:</p> <p>a.. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota</p> <p>Program perlindungan khusus anak terdiri dari:</p>	<p>438,133,950,-</p> <p>72,100,000,-</p> <p>72,100,000,-</p> <p>349,044,000,-</p> <p>349,044,000,-</p> <p>16,989,950,-</p> <p>16,989,950,-</p> <p>190,663,500,-</p>	<p>368,537,950,-</p> <p>71,140,000,-</p> <p>71,140,000,-</p> <p>280,408,000,-</p> <p>280,408,000,-</p> <p>16,989,950,-</p> <p>16,989,950,-</p> <p>184,199,475,-</p>	<p>84,12</p> <p>98,67</p> <p>98,67</p> <p>80,34</p> <p>80,34</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>96,61</p>

			1. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	78,350,000,-	76,775,200,-	97,99
			a. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota	78,350,000,-	76,775,200,-	97,99
			2. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	10,007,500,-	8,207,500,-	82,01
			a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	10,007,500,-	8,207,500,-	82,01
			3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	102,306,000,-	99,216,775,-	96,98
			a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	102,306,000,-	99,216,775,-	96,98
		Skor pencapaian kota layak anak	Program pemenuhan hak anak (PHA) terdiri dari:	50,999,400,-	49,630,000,-	97,31
			1. Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	10,389,000,-	10,385,800,-	99,97
			a. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah,	10,389,000,-	10,385,800,-	99,97

			media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota			
			2.kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	40,610,400,-	39,244,200,-	96,64
			a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota	14,235,400,-	13,334,000,-	93,67
			b. Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota	9,267,400,-	8,917,000,-	96,22
			c. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota	17,107,600,-	16,993,200,-	99,33
		Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:	277,799,900,-	271,037,500,-	97,57
			1.kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	67,267,400,-	66,661,600,-	99,10
			a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota	64,223,000,-	64,039,400,-	99,71
			b. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pug termasuk PPRG	3,044,400,-	2,622,200,-	86,13
			2.Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	122,426,200,-	118,023,600,-	96,40

			a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	122,426,200,-	118,023,600,-	96,40
			3. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	88,106,300,-	86,352,300,-	98,01
			a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota	88,106,300,-	86,352,300,-	98,01
			Program pengelolaan sistem data gender dan anak	16,898,800,-	16,570,900,-	98,06
			1. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:	16,898,800,-	16,570,900,-	98,06
			a. Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/ kota	8,822,400,-	8,793,500,-	99,67
			b. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota	8,076,400,-	7,777,400,-	96,30

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1 TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA TARGET DAN REALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	%	95	100	105,3
		Skor pencapaian kota layak anak	Skor	700	703.5	100,5
		Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)	Skor	3187	3862.5	121,2

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian semua indicator kinerja sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan atau dengan kata lain kinerja yang dihasilkan termasuk dalam kategori sangat baik.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2 TABEL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022

No	Indikator	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 Terhadap Renstra 2026 (%)
			Target	Realisasi %	Realisasi %		
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	91	95	100	105,3	95	105,3
2	Skor pencapaian kota layak anak	650	700	703.5	100,5	900	78,2
3	Skor pencapaian anugerah parahita ekapraya (APE)	2515	3187	3862.5	121,2	4300	89,8

Dari tabel pengukuran kinerja SKPD tahun 2022 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Dari laporan yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai tahun 2022, terdapat 21 korban kekerasan pada perempuan dan 114 adalah korban kekerasan pada anak, sehingga total keseluruhan korban kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 135 korban. Keseluruhan korban di atas telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar atau sebesar 100% dari 95% target yang ditetapkan pada tahun 2022. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sangat baik.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Pada tahun 2022 penilaian kota layak anak untuk Kota Dumai telah memperoleh skor 703.5 dari target skor 700 atau sebesar 100,5%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

c. Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai masih berada pada skor 3862.5 atau sebesar 121,2% dari skor yang sudah ditargetkan pada tahun 2022 yaitu 3187. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

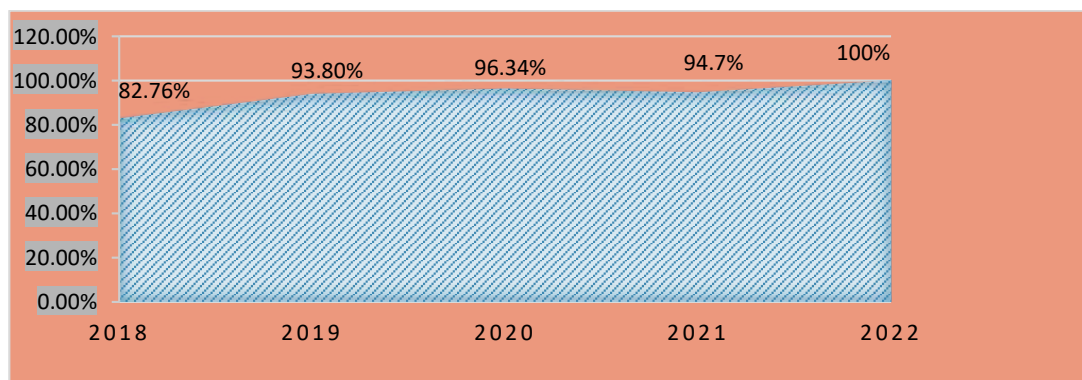
A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021)

a. Indikator Kinerja Sasaran: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar.

Pada tahun 2021 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar sebesar 94,7% dari target 91% yang telah ditetapkan tahun 2021, dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 100%, dimana jumlah korban kekerasan perempuan di Kota Dumai pada

tahun 2022 tercatat sebanyak 21 orang dan korban kekerasan pada anak sebanyak 114 orang. Dengan demikian total korban kekerasan pada perempuan dan anak pada tahun 2022 sebanyak 135 orang dan jumlah korban yang telah mendapat penanganan pengaduan sesuai standar sebanyak 135 orang atau 100%. Hal ini bermakna bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar di Kota Dumai pada tahun 2022 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai Tahun 2022 untuk indikator tersebut sebesar 109.9%. Berikut disajikan data cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022 seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 3.1 CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAAN YANG MENDAPATKAN PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR DI KOTA DUMAI PERIODE TAHUN 2018 S/D 2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

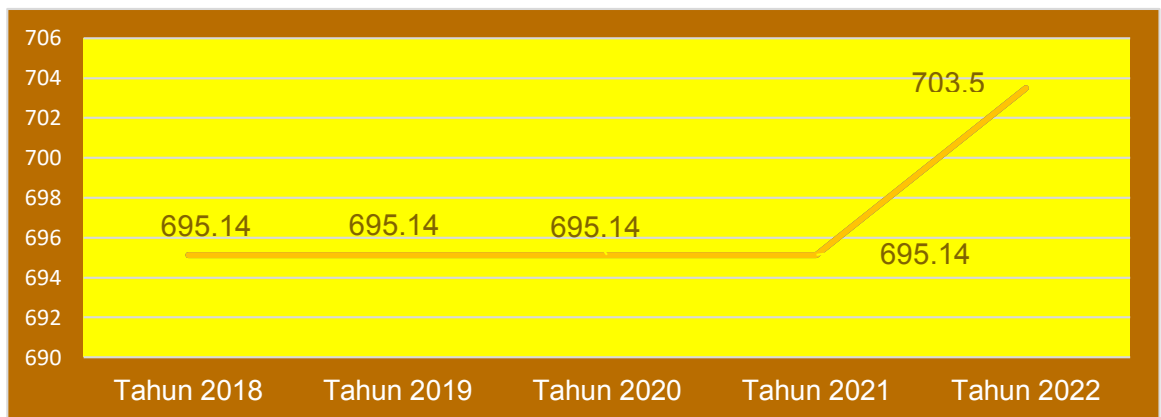
Dari grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan selama 5 tahun berturut-turut terhadap capaian indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih

di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Hal ini menggambarkan tentang kualitas pelayanan terhadap penanganan atau tindak lanjut kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Dumai dimana semua kasus kekerasan yang dilaporkan ke UPT PPA Kota Dumai telah ditindaklanjuti atau telah mendapat penanganan sesuai standar.

b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Pada tahun 2021 skor pencapaian kota layak anak untuk Kota Dumai sebesar 695,14 dari target 650 dan pada tahun 2022 Kota Dumai telah mendapat skor 703,5 dari skor 700 yang ditargetkan pada tahun 2022 atau sebesar 100,5% dengan kata lain telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka capaian Kota Dumai tahun 2022 sebesar 108,2%. Berikut disajikan realisasi skor pencapaian kota layak anak periode 2018 s/d 2022 pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 3.2 SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK KOTA DUMAI PERIODE TAHUN 2018 sd 2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

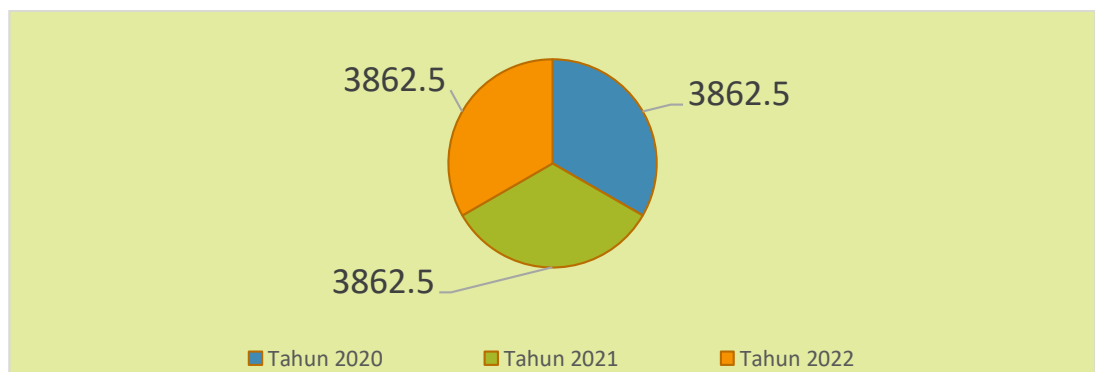
Dari grafik di atas terlihat bahwa selama 4 tahun berturut-turut Kota Dumai telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan skor 695,14 atau dengan predikat Madya, dan meningkat skor yang diraih pada tahun 2022 menjadi 703,5 dengan predikat Nindya. Pencapaian indikator tersebut telah melebihi dari target yang ditentukan pada tahun ini dengan skor 700 atau capaian sebesar 100,5% (melebihi target). Adapun penilaian Kota Layak Anak terbagi atas 4 predikat yaitu (1) Pratama dengan range skor 500-

600, (2) Madya dengan range skor 600-700, (3) Nindya dengan range skor 700-800 dan (4) Utama dengan range skor 800-900, serta Kota Layak Anak dengan range skor 900-1000.

c. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187. Pada Tahun 2000 Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5. Tahun 2021 dan 2022 pelaksanaan penilaian APE tidak dilaksanakan sehingga skor pencapaian APE Kota Dumai Tahun 2021 masih berada pada skor 3862.5 dari skor 2512 yang ditargetkan pada Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 penilaian Anugerah Parahita Ekapraya juga belum terlaksana sehingga capaian untuk Kota Dumai masih tetap pada skor 3862.5 dari skor 3187 yang ditargetkan pada Tahun 2022 atau capaian sebesar 121.2%. Hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk indikator tersebut sudah melebihi target yang diharapkan dengan kata lain bahwa indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Dan jika dibandingkan dengan target tahun lalu maka realisasi capaian Kota Dumai Tahun 2022 untuk indikator ini sebesar 153,8%. Berikut disajikan data realisasi skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai periode Tahun 2020 s/d 2022 seperti tampak pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 3.3 SKOR PENCAPAIAN ANUGERAH PARAHTA EKAPRAYA (APE) KOTA DUMAI PERIODE TAHUN 2020 sd 2022



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar

Realisasi kinerja untuk indicator sasaran tersebut adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 95% atau sebesar 105,3% (telah melebihi target) jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang berarti capaian indicator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian kota layak anak

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka realisasi kinerja pencapaian kota layak anak tahun 2022 memperoleh skor 703,5 dari target yang ditetapkan yaitu 700 atau sebesar 100,5%. Dengan demikian capaian indicator ini sudah melebihi target.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Target pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Dumai pada tahun 2022 dengan skor 3187, dan realisasi capaian Kota Dumai telah mendapat penghargaan APE dengan predikat Utama dengan skor 3862.5 atau sebesar 121,2% (telah melebihi target).

A.4. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Meningkatnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

- 1) Program perlindungan perempuan yang terdiri dari:

- a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup

daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada 7 Kecamatan, rapat koordinasi kegiatan penyusunan rencana aksi kekerasan terhadap perempuan dan anak, rapat koordinasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak, serta kegiatan evaluasi program peduli perempuan dan anak (DULREMPAK).

b. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota.. dengan target 40 layanan dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40 layanan dan terealisasi 100 %.

c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain:

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %, dan terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan berupa pembinaan PKDRT di 4 kecamatan, serta pembinaan satgas TPPO.

- 2) Program perlindungan khusus anak terdiri dari:
- a. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %. Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan kampanye perlindungan perempuan dan anak serta kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di 7 Kecamatan.
 - b. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 21 kasus dan terealisasi 100 %.
 - c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 5 dokumen dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain berupa pelatihan manajemen kasus, pelatihan pencatatan pelaporan kasus kekerasan perempuan dan anak melalui simphony, pelatihan penerapan kode etik perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual.

2. Meningkatnya skor pencapaian kota layak anak

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

1) Program pemenuhan hak anak terdiri dari:

- a. Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) dengan target 25 orang dan terealisasi 100 %, dan terselenggaranya lembaga yang ramah anak dengan target 20 lembaga dan terealisasi 100 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan ke puskesmas ramah anak dan sekolah ramah anak.
- b. Kegiatan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan
 - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga dengan target 15 kali dan terealisasi 100 %, dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak dengan target 18 forum anak dan terealisasi 100 %.
 - Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM dengan target 40 orang dan terealisasi 100%
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak dengan target 65 orang dan terealisasi 100%, dan terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100%

3. Meningkatnya skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:

a. Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan target 12 bulan dan terealisasi 100%

- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indicator keluaran yaitu persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh perangkat daerah dengan target 100%, serta terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan dengan target 7 kelurahan dan terealisasi 100%

b. Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100%.

c. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:

- Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 100%.

- 2) Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:
- a. Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota yang terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu tersedianya data informasi anak di kota dumai dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%
 - Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan indicator keluaran yaitu tersedianya media informasi gender dan anak dengan target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota dumai dengan target 1 dokumen, serta tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100%.

A.5 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2022 sebesar Rp. 5,857,789,681,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.611.923.851,-. terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52,721,851,- dan terealisasi sebesar Rp 51.209.846,- atau 97,13 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target kinerja 11 dokumen dan terealisasi 100 %, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 19,509,124,- dan terealisasi sebesar Rp 18,398,200,- atau 94,31 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.

- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4,639,739,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,384,000,- atau 94,49 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2,801,539,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,800,000,- atau 99,95 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.
 - d. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2,029,608,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,018,000,- atau 99,43 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %
 - e. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1,202,394,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,181,646,- atau 98,27 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 15,213,947,- dan terealisasi sebesar Rp. 15,141,000,- atau 99,52 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKj-IP) dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah. anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7,325,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,287,000,- atau 99,47 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %.
- 2) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.** Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4,455,770,222,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,261,651,701,- atau 95,64 % dengan indikator keluaran yaitu persentase administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 100%, dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4,445,616,222,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,251,510,701,- atau 95,63% dengan indikator keluaran yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 bulan dan terealisasi 100 %.
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,154,000,- dan terealisasi sebesar Rp.10,141,000,- atau 99,87 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.
- 3) Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.** Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,444,000,- dan terealisasi sebesar Rp 8,444,000,- atau 100% dengan indikator keluaran yaitu persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan sub kegiatan :
- a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,444,000,- dan terealisasi sebesar Rp 8,444,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen laporan inventarisasi aset dengan target 2 dokumen dan terealisasi 100 %.
- 4) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.** Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 414,215,608,- dan terealisasi sebesar Rp. 407,248,131,- atau 98,32 % dengan indikator keluaran yaitu persentase administrasi umum perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 98,32 % sub kegiatan :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6,591,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,591,200,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 90,985,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 90,971,500,- atau 99,98 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

- c. Penyediaan peralatan rumah tangga. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 11,076,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 11,076,200,- atau 100 % dengan indikator keluaran jumlah penyediaan kebutuhan alat kebersihan kantor dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20,441,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 20,327,300,- atau 99,44 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 53,747,388,- dan terealisasi sebesar Rp. 47,005,500,- atau 87,46 % dengan indikator keluaran jumlah penyediaan kebutuhan barang cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 7,728,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,728,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 223,645,370,- dan terealisasi sebesar Rp. 223,548,431,- atau 99,96 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
- 5) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.** Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 819,468,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 776,257,173,- atau 94,73 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya penyediaan jasa umum perangkat daerah dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 % dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 198,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 170,000,- atau 85,47 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah kebutuhan jasa surat menyurat dengan target 12 bulan dan realisasi 100 % . .

- b.** Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 122,669,100,- dan terealisasi sebesar Rp. 79,487,173,- atau 64,80 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
- c.** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 696,600,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 696,600,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor, jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran, jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir, jumlah penyediaan kebutuhan jasa psikolog, jumlah penyediaan jasa petugas pendamping/ penyuluh, dan jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga operator computer, serta tersedianya jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
- 6)** Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 107,170,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 107,113,000,- atau 99,95 % dengan indikator keluaran yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 12 bulan dengan sub kegiatan :

 - a.** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 82,090,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82,085,625 atau 99,99 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara secara rutin/ berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas jabatan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - b.** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 13,340,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,287,375,- atau 99,61 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara secara rutin/ berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional dan lapangan dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.

- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5,030,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5,030,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
- d. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 6,710,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,710,000,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhab secara rutin/ berkala dengan target 10 unit dan terealisasi 100 %.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2022 sebesar Rp. 277,799,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 271,037,500,- atau 97,57 % dengan indikator program yaitu meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai dengan target 10 % yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 67,267,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 66,661,600,- atau 99,10 % dengan indikator keluaran persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan target 100 % dan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 64,223,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 64,039,400,- atau 99,71 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan target 12 bulan dan terealisasi 100 %.
 - b. Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3,044,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,622,200,- atau 86,13 % dengan indikator yaitu terlaksananya persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk

PPRG di seluruh perangkat daerah dengan target 100%, serta terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan dengan target 7 kelurahan dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 122,426,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 118,023,600,- atau 96,40 % dengan target keluaran yaitu terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dengan target 7 kecamatan dengan sub kegiatan

a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 122,426,200,- dan terealisasi sebesar Rp. 118,023,600,- atau 96,40 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88,106,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 86,352,300,- atau 98,01 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (kegiatan) dengan target 2 kegiatan dengan sub kegiatan :

a. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88,106,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 86,352,300,- atau 98,01 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM dengan target 2 kegiatan dan terealisasi 100 %.

3. Program Perlindungan Perempuan

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2022 sebesar Rp. 438,133,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 368,537,950,- atau 84,12 % dengan indikator program yaitu meningkatnya perlindungan

bagi perempuan dengan target 20 % yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

1) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 72,100,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71,140,000,- atau 98,67 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target 7 kecamatan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia yaitu Rp. 72,100,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71,140,000,- atau 98,67 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota.. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 349,044,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 280,408,000,- atau 80,34 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40 layanan dan sub kegiatan :

a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 349,044,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 280,408,000,- atau 80,34 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40 layanan dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16,989,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,989,950,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dengan target 12 bulan dan sub kegiatan :

- a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16,989,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,989,950,- atau 100 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang, serta terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %.

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 16,898,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,570,900,- atau 98,06 % dengan indikator program yaitu meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak dengan target 30 % yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16,898,800,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,570,900,- atau 98,06 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 2 dokumen dan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,822,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,793,500,- atau 99,67 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai dengan target 1 Dokumen dan tersedianya data gender di Kota Dumai dengan target 1 Dokumen dan terealisasi 100 %.

- b. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 8,076,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,777,400,- atau 96,30 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya media informasi gender dan anak dengan target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota Dumai dengan target 1 dokumen, serta tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen dan terealisasi 100 %.

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 50,999,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 49,630,000,- atau 97,31 % dengan indikator program yaitu meningkatnya capaian skor kota layak anak (> 700) yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,389,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,385,800,- atau 99,97 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (lembaga pemerintah,/ non pemerintah/ dunia usaha) dengan target 20 lembaga, dengan sub kegiatan :

- a Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,389,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,385,800,- atau 99,97 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan Informasi Layak Anak (ILA) dengan target 25 orang dan terealisasi 100%, serta terselenggaranya lembaga yang ramah anak dengan target 20 lembaga dan terealisasi 100 %.

- 2) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 40,610,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 39,244,200,- atau 96,64 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya

penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dengan target 18 Forum Anak dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 14,235,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,334,000,- atau 93,67 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga, dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak dengan target 18 forum anak dan terealisasi 100 %.
- b. Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9,267,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,917,000,- atau 96,22 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya bimtek konvensi hak anak, terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM, dan terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi dengan target 40 orang dan terealisasi 100 %..
- c. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 17,107,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,993,200 atau 99,33 % dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak dengan target 65 orang, dan terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan dan terealisasi 100 %.

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Untuk pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 190,663,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 184,199,475,- atau 96,61 % dengan indikator program yaitu meningkatnya perlindungan khusus anak dengan target 40%. yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- 1) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 78,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp.76,775,200 atau 97,99 % dengan indikator keluaran adalah jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan

kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dengan sub kegiatan :

a Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 78,350,000,- dan terealisasi sebesar Rp.76,775,200 atau 97,99 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen dan terealisasi 100 %.

2) Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,007,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,207,500,- atau 82,01 % dengan indikator keluaran yaitu tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 12 bulan dengan sub kegiatan

a. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10,007,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,207,500,- atau 82,01 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 21 kasus dan terealisasi 100 %.

3) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 102,306,000,- dan terealisasi sebesar Rp.99,216,775,- atau 96,98 % dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 12 bulan dengan sub kegiatan

a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 102,306,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99,216,775,- atau 96,98 % dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas sumber daya lembaga penyedia

layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/ kota dengan target 5 dokumen dan terealisasi 100 %.

B. REALISASI ANGGARAN

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 6,501,899,676.- dari jumlah anggaran Rp. 6.832.285.231,- atau sebesar 95,16 % dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Gambaran realisasi kinerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 disajikan dalam tabel 3.3 di bawah ini :

**TABEL 3.3 REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	%	95	100	105,3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.857.789.681,-	5,611,923,851,-	95,80
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					277.799.900,-	271,037,500,-	97,57	
		Program Perlindungan Perempuan					438.133.950,-	368,537,950,-	84,12	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					16.898.800,-	16,570,900,-	98,06	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					50.999.400,-	49,630,000,-	97,31	
		Program Perlindungan Khusus Anak					190.663.500,-	184,199,475,-	96,61	
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor	700	703,5	100,5				
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	3187	3862,5	121,2				

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup untuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Begitu juga pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026. Semua program dan kegiatan telah dapat direalisasikan dengan baik. Namun demikian, selama tahun 2022 masih ditemui beberapa hambatan / permasalahan yang harus dibenahi khususnya dalam penyelenggaraan urusan wajib dikarenakan masih terbatasnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga masih banyak program kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Melihat dari permasalahan di atas, diharapkan untuk tahun yang akan datang penganggaran bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat dipertimbangkan mengingat masih banyaknya kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dapat diakomodir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun Anggaran 2022 ini disusun, dan selanjutnya diajukan kepada Bapak Wali Kota Dumai serta pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

LAMPIRAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

ESSELON II



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAINI ASNA, SKM, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : H. PAISAL, SKM. MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM. MARS

PIHAK PERTAMA,

MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standar	%	95
		Skor pencapaian Kota Layak Anak	Skor	700
		Skor pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	%	3187

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	I.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	277,799,900
	1.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	67,267,400
	1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	64,223,000
	1.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	3,044,400
	1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	122,426,200
	1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dibidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp	122,426,200
	1.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	88,106,300
	1.3.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	88,106,300
	II.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp	438,133,950
	2.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /kota	Rp	72,100,000
	2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.	Rp	72,100,000
	2.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	349,044,000
	2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	349,044,000
	2.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	16,989,950
	2.1.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Rp	16,989,950

III.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp	16,898,800
3.1	Kegiatan Pengumpulan, Pengelola Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	16,898,800
3.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	8,822,400
3.1.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	8,076,400
IV.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp	50,999,400
4.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	10,389,000
4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	10,389,000
4.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	40,610,400
4.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp	14,235,400
4.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9,267,400
4.2.3	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp	17,107,600
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp	190,663,500
5.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Rp	78,350,000
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	78,350,000
5.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,007,500
5.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	10,007,500
5.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	102,306,000
5.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	102,306,000
	Jumlah	Rp	974,495,550



Dumai, 7 Oktober 2022



ESSELON III



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWARNI, SH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : MAINI ASNA, SKM, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS



SUWARNI, SH.M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/Kota	%	100

Sasaran	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp	5,857,789,681
		Kegiatan perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	52,721,851
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Rp	19,509,124
		Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp	4,639,739
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp	2,801,539
		Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Rp	2,029,608
		Koordinasi penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp	1,202,394
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD	Rp	15,213,947
		Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Rp	7,325,500
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	4,455,770,222
		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	4,445,616,222
		koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp	10,154,000
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	8,444,000
		Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Rp	8,444,000
		Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	414,215,608
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	6,591,200

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	90,985,550
Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	11,076,200
Pengadaan bahan logistik kantor	Rp	20,441,900
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	53,747,388
Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp	7,728,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	223,645,370
Kegiatan penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	819,468,000
Penyediaan jasa surat meyrat	Rp	198,900
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	122,669,100
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	696,600,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	107,170,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas dan atau kendaraan dinas jabatan	Rp	82,090,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan perorangan Dinas operasional atau lapangan	Rp	13,340,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,030,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
JUMLAH	Rp	5,857,789,681


Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama
SEKRETARIS


SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005



Pihak Kedua
KEPALA DINAS


MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19860529 198603 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra.HEPPI SYURYANI
Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK
Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : MAINI ASNA, SKM, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

Dra.HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak	%	30%

Sasaran : Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK **16,898,800**

Kegiatan Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota **8,822,400**

Kegiatan Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan Kabupaten/Kota **8,076,400**

Jumlah 16,898,800

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA

MAINI ASNA, SKM, M.Si
 NIP. 19640529 198903 2 002

Pihak Pertama
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK


Dra. HEPPI SYURYANI
 NIP. 19650930 199003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MAINI ASNA, SKM, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK


MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19790308 200212 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase ARG di Kota Dumai	%	10

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	277,799,900
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	67,267,400
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	64,223,000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	3,044,400
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122,426,200
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	122,426,200
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	88,106,300
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	88,106,300
	Jumlah	277,799,900

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2002

Dumai, 7 Oktober 2022
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BULAN, S.Kep

Jabatan : KABID. PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : MAINI ASNA, SKM, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

KEPALA DINAS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19660529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya capaian skor Kota Layak Anak > 700	Skor	700


Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	50,999,400
Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Rp	10,389,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	10,389,000
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	40,610,400
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	14,235,400
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9,267,400
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	17,107,600
Jumlah	Rp	50,999,400

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19660529 198903 2 002

Dumai, 7 Oktober 2022
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK



SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes

Jabatan : KABID. PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MAINI ASNA, SKM, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 1 002

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN



IRFAN WAHYUDI SKM, M. Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan	%	20
2	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	%	40

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	438,133,950
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72,100,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	72,100,000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	349,044,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	349,044,000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16,989,950
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	16,989,950	

PROGRAM	190,663,500
PERLINDUNGAN	
KHUSUS ANAK	
Kegiatan Pencegahan	78,350,000
Kekerasan terhadap	
Anak yang Melibatkan	
para pihak Lingkup	
Daerah Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan	78,350,000
Sinkronisasi Pencegahan	
Kekerasan terhadap Anak	
Kewenangan	
Kabupaten/Kota	
Kegiatan Penyediaan	10,007,500
Layanan bagi Anak yang	
memerlukan	
Perlindungan Khusus	
yang memerlukan	
Koordinasi Tingkat	
Daerah Kabupaten/Kota	
Penyediaan Layanan	10,007,500
Pengaduan Masyarakat	
bagi Anak yang	
Memerlukan Perlindungan	
Khusus Tingkat Daerah	
Kabupaten/Kota	
Kegiatan Penguatan dan	102,306,000
Pengembangan	
Lembaga Penyedia	
Layanan bagi Anak yang	
memerlukan	
Perlindungan Khusus	
Tingkat Daerah	
Kabupaten/Kota	
Koordinasi dan	102,306,000
Sinkronisasi Peningkatan	
Kapasitas Sumber Daya	
Lembaga Penyedia	
Layanan Anak yang	
memerlukan	
Perlindungan Khusus	
Tingkat Daerah	
Jumlah	628,797,450

Pihak Kedua
KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP. 19680529 198903 2 002

Dumai, 7 Oktober 2022
Kepala Bidang Perlindungan Anak Perempuan



IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

ESSELON IV



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **FAJARIA RUSMEITY, SKM**

Jabatan : **KEPALA UPT PPA**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **MAINI ASNA, SKM, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PPPA**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007



PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PPPA

MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP.19680529 198903 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kasus	21

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Perempuan Rp 349,044,000

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 349,044,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 349,044,000

Program Perlindungan Khusus Anak Rp 10,007,500

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota Rp 10,007,500

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Rp 10,007,500

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama
KEPALA UPT PPA


FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PPPA

MAMI ASNA, SKM, M. Si
NIP.19680529 198903 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RESTI EKO YULIANTI, AMK

Jabatan : KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : FAJARIA RUSMEITY, SKM

Jabatan : KEPALA UPT PPA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PPA

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBAG TATA USAHA UPT PPA

RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP.19800725 200604 2 017

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	kasus	21

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Perempuan Rp 349,044,000

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 349,044,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 349,044,000

Program Perlindungan Khusus Anak Rp 10,007,500

Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota Rp 10,007,500

Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota Rp 10,007,500

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA UPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP.19780524 200501 2 007

Pihak Pertama
KEPALA SUBBAG TU UPT PPA



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILI KURNIATI, S.Tr, Keb
Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SUWARNI, SH,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS

SUWARNI, SH,M.Si
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA,
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr, Keb
NIP. 19770727 200604 2 021


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12
2		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12
3		Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Bulan	12
4		Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12
5		Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12
6		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
7		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12
8		Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12
9		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
10		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12
11		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Bulan	12
12		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12
13		Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12
14		Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12

Sasaran : Meningkatkan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	1,340,853,608
	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp	6,591,200
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp	90,985,550

Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp	11,076,200
Penyediaan bahan logistik kantor	Rp	20,441,900
penyediaan barang cetak dan pengandaan	Rp	53,747,388
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	7,728,000
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp	223,645,370
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	819,468,000
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp	198,900
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	122,669,100
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp	696,600,000
Kegiatan Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Rp	107,170,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Rp	82,090,000
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp	13,340,000
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	5,030,000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp	6,710,000
Jumlah	Rp	1,340,853,608

Pihak Kedua
SEKRETARIS


SUWARNI, SH.M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Dumai, 7 Oktober 2022
Pihak Pertama

KASUBBAG TATA USAHA


LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SUWARNI, SH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,
PERENCANA AHLI MUDA


NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS


SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERENCANA AHLI MUDA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja)	Dokumen	2
		Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	1
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)	Dokumen	2
		Jumlah dokumen PK RKT dan RA	Dokumen	3

Sasaran :	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp	52,721,851
		Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	52,721,851
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp	19,509,124
		koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Rp	4,639,739
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Rp	2,801,539
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Rp	2,029,608
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	Rp	1,202,394
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	15,213,947
		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	7,325,500
		Jumlah	Rp	52,721,851

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
Sekretaris



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
Perencana Ahli Muda



NETTY LINDAWATI, S. Si, T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SUWARNI, SH, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
SEKRETARIS

SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Bulan	14
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	2
		Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Dokumen	2

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	PROGRAM	Rp 4,455,770,222
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4,455,770,222
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp 4,445,616,222
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp 10,154,000
	JUMLAH	Rp 4,455,770,222

Dumai, 2022

Pihak Kedua
SEKRETARIS •


SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

Pihak Pertama
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI MUDA


YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. NURMIATI

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Dra. HEPPY SYURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK.

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER
DAN ANAK

Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai dan anak di kota Dumai	Dokumen	1
		Tersedianya data gender di kota Dumai	Dokumen	1

Sasaran :

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8,822,400

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

8,822,400

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

8,822,400

Jumlah 8,822,400

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
Kepala Bidang Data Informasi
Gender dan Anak

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004



Dra. NURMIATI
NIP. 19691015 199503 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI DUMAYATI, A.Md

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Dra. HEPPI SYURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI
GENDER DAN ANAK

Dra. HEPPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SRI DUMAYATI, A.Md
NIP. 19710128 200003 2 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	a. Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai	Dokumen	1
b. Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai		Dokumen	1	
c. Tersedianya media informasi gender dan anak		Jenis media	3	

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 8,076,400
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	8,076,400
	Jumlah	Rp 8,076,400

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
Kepala Bidang Data Informasi
Gender dan Anak



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
Analis Kebijakan Ahli Muda



SRI DUMAYATI, A. Md
NIP. 19710128 200003 2 006



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAN ANNA FITRIYAH, SKM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Dra.HEPPI SYURYANI

Jabatan : KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER DAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG DATA INFORMASI GENDER
DAN ANAK

Dra.HEPPI SYURYANI
NIP. 19770315 200212 1 009

PIHAK PERTAMA,
ANALISIS KEBIJAKAN

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)		(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai	Dokumen	1
		Tersedianya data gender di Kota Dumai	Dokumen	1

Sasaran	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	8,822,400
		Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat	Rp	8,822,400
		Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	8,822,400
Jumlah			Rp	8,822,400

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG DATA
DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK



Dra. HEPPY SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP : 19780430 200003 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI YUSMANIDAR, SKM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM

Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 003

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


DEWI YUSMANIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Bulan	12
		Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh Peragkat Daerah	%	100

Sasaran	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Rp67,267,400
		Kegiatan pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Rp67,267,400
		Koordinasi dan sikronisasi pelaksanaan PUG kewenaangan kabupaten/kota	Rp64,223,000
		Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp3,044,400
	Jumlah		Rp67,267,400

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


DEWI YASMANIDAR. SKM
NIP. 19690826 199303 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA KURNIASARY, SE
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN
KELUARGA

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001

NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	Kecamatan	7 Kecamatan

Sasaran	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	122,426,200
		Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan	Rp	122,426,200
		Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik hukum, sosial dan ekonomi	Rp	122,426,200
		Jumlah	Rp	122,426,200

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA


SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NOVA KURNIASARY, SE
NIP 19721102 200604 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKMALIA YARNELINUR, SKM
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : SRI TRIANI INDARI, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN
KETAHANAN KELUARGA

SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terlaksananya Pengembangan KIE dalam meningkatkan kapasitas SDM	Kegiatan	2

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

**PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN**

88,106,300

**Kegiatan Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan**

88,106,300

**Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan
Jumlah**

88,106,300

88,106,300

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
DAN KETAHANAN KELUARGA



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP. 19691022 198911 2 001

Dumai, 7 Oktober 2022
Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN
AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SURNIATI

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns.SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 1988112 001

PIHAK PERTAMA,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM	Orang	40
		Terselenggaranya penguatan Informasi Layak Anak	Orang	25

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	19,656,400
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	10,389,000
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	10,389,000
	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	9,267,400
	Pengembangan komunikasi dan informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9,267,400
	Jumlah	Rp	19,656,400

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PEMENUHAN
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
ANAK



SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Pertama
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. DEVY DIANNY. M. K. M

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep,

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns.SRI BULAN, S.Kep,
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

dr. DEVY DIANNY. M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga	Kali	15
		Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak	Forum Anak	18

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp 14,235,400

Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota 14,235,400

Jumlah Rp 14,235,400

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG PEMENUHAN
HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN
ANAK**

SRI BULAN, S.Kep,
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

dr. DEVI DIANNY, M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M

Jabatan : PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : Ns.SRI BULAN, S.Kep

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK
ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ns.SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PIHAK PERTAMA,
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya lembaga yang ramah anak	Lembaga	20
		Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak	Orang	65
		Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi Kecamatan Layak Anak	kecamatan	7

Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	27,496,600
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	10,389,000
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	10,389,000
	kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	17,107,600
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota	Rp	17,107,600
	Jumlah	Rp	27,496,600

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
**KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK ANAK DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Ns. SRI BULAN, S.Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

Pihak Pertama
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si**

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes

Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PHP

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

MURNI ASNITA, S. Sos, M.Si
NIP. 19790826 200604 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah	dokumen	3

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaannya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Perempuan **Rp72,100,000**

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota **Rp72,100,000**

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah **Rp72,100,000**

Jumlah **Rp72,100,000**

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PHP



IRFAN WAHYUDI, SKM, M.Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. Sos, M. Si
NIP. 19790826 200604 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAN HAMELDA, SST
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PHP

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes
NIP. 19680529 198903 2 002

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Kecamatan	7
		Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	Kecamatan	7

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

Program Perlindungan Perempuan Rp 89,089,950

Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/Kota Rp 16,989,950

Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Rp 16,989,950

Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/Kota Rp 72,100,000

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota Rp 72,100,000

Jumlah Rp 89,089,950


Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PHP



IRFAN WAHYUDI, SKM, M. KES
NIP. 19790402 199803 1 002

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI BUDA



WAN HAMELBA, SST
NIP. 19780305 200312 2 005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ns. ISRAMIARTI, S.Kep
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : IRFAN WAHYUDI, SKM, M.Kes
Jabatan : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA BIDANG PHP

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. S. Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

PIHAK PERTAMA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. ISRAMIARTI, S.Kep
NIP. 19750805 200312 2 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	dokumen	5

Sasaran :	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Program Perlindungan khusus anak	Rp102,306,000
		Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/Kota	102,306,000
		Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota	102,306,000
		Jumlah	Rp102,306,000

Dumai, 7 Oktober 2022

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PHP



IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Kes
NIP. 19790402 199803 1 002

Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. ISRA MIARTI, S.Kep
NIP.19750805 200312 2 011

JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGIARTI, S.Kom

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : NETTY LINDAWATI, S.Si. T, M. IP

Jabatan : PERENCANA AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
PERENCANA AHLI MUDA


NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA


SUGIARTI, S.Kom
NIP. 19780807 201001 2 016

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: PERUBAHAN 2022.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan penganusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu menyiapkan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja tahunan, Rencana Aksi perubahan tahun 2022 Membantu menyiapkan dokumen perubahan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja tahunan, Rencana Aksi Tahun 2022 Membantu menyiapkan dokumen LPPD, LKPJ, LKJ tahun 2022 Membantu menyiapkan dokumen Rencana Kerja perubahan 2022 dan rencana kerja 2022 Membantu menginput RKA perubahan 2022, RKA 2023 Membantu menginput Rencana kerja perubahan 2022 dan RENJA 2022 Membantu penginputan E-MONEV tahun 2022 Membantu menyiapkan dokumen RENSTRA 2021 - 2026 sesuai RPJMD Kota Dumai 	<ol style="list-style-type: none"> 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Kali 1 Kali 1 Dokumen 1 Dokumen 	<ol style="list-style-type: none"> Pendokumentasian Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana aksi tahun 2022 Pendokumentasian Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana aksi Perubahan tahun 2022 Pendokumentasian LPPD, LKPJ, LKJ tahun 2022 Pendokumentasian Rencana Kerja 2023 Penginputan RKA perubahan 2022, RKA 2023 Penginputan RENJA perubahan 2022 dan RENJA 2023 Penginputan E- MONEV tahun 2022 Pendokumentasi dokumen RENSTRA 2021 - 2026 sesuai RPJMD Kota Dumai

PERENCANA AHLI MUDA

NETTY LINDAWATI, S. Si. T. M. IP
NIP. 19720229 199201 2 001

PELAKSANA

SUGIARTI, S. Kom
NIP. 19780807 201001 2 016



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI YUSNITA, SST

Jabatan : PELKSANA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA

YUNI WELDA, SE
NIP. 1977060614 200501 2 006

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

ENI YUSNITA, SST
NIP. 19821025 200701 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membuat registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2022 2 Melakukan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2022 3 Melakukan pemeriksaan kelengkapan GU dan melakukan pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku 4 Melakukan pemotongan dan pembayaran pajak kepada kas negara 5 Mencatat seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum	50 Berkas 50 Berkas 500 Kwitansi 450 SSP 500 Kwitansi	Pendokumentasian registrasi SPP, SPM untuk gaji, tambahan penghasilan dan kegiatan Tahun 2022 Pendokumentasian pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) LS, UP dan GU kepada pengguna anggaran berdasarkan DPA dan anggaran kas Tahun 2022 Pendokumentasian kelengkapan GU dan serah terima pembayaran kepada PPTK setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran sesuai ketentuan berlaku Pendokumentasian Daftar Transaksi Harian Belanja dan Pendokumentasian rekapitulasi transaksi harian belanja daerah Tahun 2022 Pendokumentasian seluruh pengeluaran berdasarkan SP2D yang diterima dan pendokumentasian tanda bukti pengeluaran yang sah kedalam buku kas umum

6	Membuat laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2021	12 Berkas	Pendokumentasian laporan Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Secara Non Tunai Tahun 2022		
7	Membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) fungsional	150 Kegiatan	Penginputan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional		
8	Membantu mendokumentasikan seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur	50 Berkas	Pendokumentasian seluruh tanda bukti pengeluaran serta dokumen lain secara tertib dan teratur		
9	Membuat laporan tahunan pertanggung jawaban keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD	1 Dokumen	Pendokumentasian laporan tahunan pertanggung jawaban keuangan kepada anggaran melalui PPK SKPD		

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE

NIP. 19770614 200501 2 008

PELAKSANA



ENI YUSNITA

NIP. 198210525 200501 2 009



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : YUNI WELDA, SE

Jabatan : ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
ANALIS KEUANGAN

YUNI WELDA, SE
NIP. 19770614 200501 2 008

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329 201001 2 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2022 Membantu menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Membantu menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah Membantu membuat laporan inventarisasi Membantu menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program Membantu menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan 1 Berkas 	<p>Pendokumentasian Penginputan Aliran Kas Anggaran Perubahan Tahun 2022</p> <p>Pendokumentasian menyiapkan pelayanan administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai</p> <p>Pendokumentasian menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>Pendokumentasian membuat laporan inventarisasi</p> <p>Pendokumentasian menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait untuk kelancaran tugas</p> <p>Pendokumentasian menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah serta sarana program</p> <p>Pendokumentasian menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya</p>

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI MUDA


YUNI WELJDA, SE.

NIP. 19770614 200501 2 008

PEKAKSANA



RINI DEWI TOPUTRI, A.Md Keb
NIP. 19760329 201001 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARNITAWATI, S. Sos

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : LILI KURNIATI, S.Tr. Keb

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

DARNITAWATI, Sos
NIP. 19660420 199202 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Tenwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha 2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN) 3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan 4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan 5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	14 Dokumen	Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

PELAKSANA



DARNITA WATI, S.Sos
NIP. 19660420 199202 2 001



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYILVIYANTI, SST

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : LILI KURNIATI, S.Tr. Keb

Jabatan : KASUBBAG TATA USAHA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

SYILVIYANTI, SST
NIP. 19830105 200501 2 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Mengarsipkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha	14 Dokumen	Melakukan pengarsipan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Tata Usaha
			2 Mengarsipkan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)	28 Dokumen	Melakukan pengarsipan data dan informasi Aparatur sipil Negara (ASN)
			3 Membantu Mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan	24 Dokumen	Membantu mengevaluasi data/informasi ASN terkait dengan pembinaan dan pengawasan
			4 Membantu Menyiapkan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan	100 Lembar	Membantu mempersiapkan surat menyurat/ naskah dinas dan kearsipan
			5 Mengarsipkan surat masuk/ yang telah didisposisi dan surat keluar	100 Lembar	Melakukan pengarsipan surat masuk dan surat keluar yang telah didisposisi

KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
 NIP. 19770727 200604 2 021

PELAKSANA

SYILVIYANTI, SST
 NIP. 19830105 200501 2 003



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINDA NATARIA, AMK

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : WAN ANNA FITRIYAH, SKM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
ANALIS KEBIJAKAN MUDA

WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

LINDA NATARIA, AMK
NIP. 19860616 201001 2 038

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah
 Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	1 Membantu Pendataan Kelembagaan Organisasi Perempuan, Gender dan Anak	1 Dokumen	Pendokumentasian Data Kelembagaan Organisasi Perempuan Gender dan Anak
2			2 Membantu Pendataan Gender dan Anak	1 Dokumen	Pendokumentasian Data Gender dan Anak
3			3 Membantu Membuat Laporan Kegiatan	2 Kegiatan	Pendokumentasian Laporan Kegiatan
4			4 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang Data	15 Surat	Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Data

ANALIS KEBIJAKAN AHLI
 MUDA



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
 NIP. 19780430 200003 2 004

PELAKSANA



LINDA NATARIA, AMK
 NIP. 19860616 201001 2 038



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTIEN SARI NOVA, S.Kep

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AKMALIA YARNELINUR, SKM

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 200501 2 004

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
NIP. 19811115 201001 2 010

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
 Tahun Anggaran : Perubahan 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	1 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PKHPKK 2 Membantu membuat SK kegiatan dibidang PKHPKK 3 Membantu Melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG 4 Membantu Membuat Laporan Kegiatan 5 Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar bidang PKHPKK	1 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Surat	Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PKHPKK Pendokumentasian SK Kegiatan di Bidang PKHPKK Pendokumentasian kegiatan evaluasi pelaksanaan PUG Pendokumentasian Laporan Kegiatan Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang PKHPKK

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
 NIP. 19821123 200501 2 004

PELAKSANA



ASTIEN SARI NOVA, S.Kep
 NIP. 19811115 201001 2 010



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNI MARLINA, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : **WAN HAMELDA, SST**

Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selaku atasan langsung *Pihak Pertama*

Selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab *Pihak Pertama*

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

WAN HAMELDA, SST
NIP. 19780808 200312 2 005

PIHAK PERTAMA,
Analisis Perencanaan

YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 197903262007012005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : PERUBAHAN 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> Membantu membuat rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Tahun 2022 dan Penginputan Perubahan Anggaran Tahun 2022 Membantu membuat konsep kegiatan di bidang PHP Membantu membuat SK kegiatan dibidang PHP Membantu membuat indikator kinerja th 2022 untuk th 2023 Membantu Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Membantu Mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan Membantu Melaksanakan rapat Koordinasi dengan Kelurahan Membantu Melaksanakan Kegiatan penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak Membantu Membuat Laporan Kegiatan Membantu Mengkonsep Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Berkas 1 Laporan 4 Kegiatan 20 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 20 Surat 	<p>Pendokumentasian rencana Kegiatan Anggaran dan Penginputan Anggaran Perubahan Tahun 2022</p> <p>Pendokumentasian konsep kegiatan di bidang PHP</p> <p>Pendokumentasian SK Kegiatan di Bidang PHP</p> <p>Pendokumentasian Indikator Kinerja Tahun 2022 untuk Tahun 2023</p> <p>Pendokumentasian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kecamatan</p> <p>Pendokumentasian rapat Koordinasi di Kelurahan</p> <p>Pendokumentasian Kegiatan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak</p> <p>Pendokumentasian Laporan Kegiatan</p> <p>Pendokumentasian Surat Masuk dan Keluar Bidang Perlindungan Hak Perempuan</p>

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


WAN HAMELIDA, SST
NIP. 19780308 200312 2 005

ANALIS PERENCANA


YENNI MARLINA, S.Sos
NIP. 197906262007012005



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ESTER PRISKA DACHI, S.Kep

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : FAJARIA RUSMEITY, SKM

Jabatan : KEPALA UPT DPPPA

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT DPPPA

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

ESTER PRISKA DACHI, S. Kep
NIP. 19850401 201102 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Tahun Anggaran : Perubahan 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota dumi	3 Meningkatnya pelaksanaan pengarusufamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus 2 Menerima pengadu 3 Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) 4 Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir 5 Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir 6 Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus 7 Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan 8 Memindahkan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA 9 Mendampingi korban di lembaga Hukum	5 50 kasus 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban	6 Melakukan pengumpulan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus Melakukan penerimaan pengadu Melakukan persiapan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) Melakukan pemeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir Melakukan pengadministrasian aduan kedalam buku register / formulir Melakukan persiapan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus Melakukan penyusunan surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan Melakukan pemindahan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA Melakukan pendampingan korban di lembaga Hukum

KEPALA UPT DPPP



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PELAKSANA



ESTER PRISKA DACHI, S. Kep
NIP. 19850104 201102 2 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi

Jabatan : PELAKSANA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FAJARIA RUSMEITY, SKM

Jabatan : KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 7 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
KEPALA UPT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK

FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PIHAK PERTAMA,
PELAKSANA

WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi
NIP. 19930923 202012 2 018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
: Perubahan 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	2 Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota dumi	3 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	4 1 Mengumpulkan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus 2 Menerima pengadu 3 Menyiapkan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio,kamera, dll) 4 Memeriksa kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir 5 Mengadministrasi aduan kedalam buku register / formulir 6 Mempersiapkan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus 7 Menyusun surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan 8 Memindahkan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA 9 Mendampingi korban di lembaga Hukum	5 50 kasus 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 korban 50 kasus 50 korban	6 Melakukan pengumpulan hasil rekomendasi dalam pengelolaan kasus Melakukan penerimaan pengadu Melakukan persiapan alat pendokumentasian (catatan, perekam audio, kamera, dll) Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengaduan sesuai dengan buku register / formulir Melakukan pengadministrasian aduan kedalam buku register / formulir Melakukan persiapan surat pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang di lokasi kasus Melakukan penyusunan surat pengajuan kebutuhan sumber daya terkait pelaksanaan pendampingan Melakukan pemindahan informasi dari buku register kasus kedalam aplikasi Simfoni PPA Melakukan pendampingan korban di lembaga di lembaga Hukum

KEPALA UPTD.PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PELAKSANA



WIDYA ANUGRAH IMAN SARI, S. Psi
NIP. 19930923 202012 2 018

**RENCANA AKSI DARI PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

ESELON II

PERUBAHAN RENCANA AKSI DARI PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart	4 %	5 95	6 95	7 95	8 95	9 95	10 Program Perlindungan Perempuan	11 Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	12 20%	13 438,133,950	14 Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	15 Jumlah dokumen hasil kegiatan pengcegaan kekErasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	16 3 Dokumen	17 72,100,000
													Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup kabupaten/kota	3 Dokumen	72,100,000
													Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	40 Layanan	349,044,000
													Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	40 Layanan	349,044,000
													Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	16,986,950

<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan khusus Anak</p>	<p>50%</p>	<p>190,663,600</p>	<p>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan melalui Sabuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Sabuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>7 Kecamatan</p>	<p>16,989,950</p>
<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan khusus Anak</p>	<p>50%</p>	<p>190,663,600</p>	<p>Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>3 Dokumen</p>	<p>78,350,000</p>
<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan khusus Anak</p>	<p>50%</p>	<p>190,663,600</p>	<p>Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>3 Dokumen</p>	<p>78,350,000</p>
<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan khusus Anak</p>	<p>50%</p>	<p>190,663,600</p>	<p>Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Tersedianya Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (Bulan)</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>10,007,500</p>
<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan khusus Anak</p>	<p>50%</p>	<p>190,663,600</p>	<p>Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus</p>	<p>21 Kasus</p>	<p>10,007,500</p>

<p>Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (Bulan)</p>	<p>12 Bulan</p>	<p>102,306,000</p>
<p>Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>5 Dokumen</p>	<p>102,306,000</p>
<p>Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kawenangan kabupaten/kota</p>	<p>Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak (100 Lembaga Pemerintah, 15 Non Pemerintah, dan 30 Dunia Usaha)</p>	<p>20 Lembaga</p>	<p>10,369,000</p>
<p>Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kawenangan kabupaten/kota</p>	<p>a. Terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) b. Terselenggaranya lembaga yang ramah anak</p>	<p>25 Orang 20 Lembaga</p>	<p>10,369,000</p>
<p>Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kawenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak</p>	<p>20 Lembaga</p>	<p>40,610,400</p>
<p>50,999,400</p>	<p>Program Pemenuhan Hak Anak</p>	<p>Meningkatnya capaian skor kota layak anak</p>	<p>>700 Skor</p>
<p>700</p>	<p>700</p>	<p>700</p>	<p>Skor</p>
<p>Skor pencapaian Kota Layak Anak</p>	<p>Skor</p>	<p>700</p>	<p>700</p>

<p>Terselenggaranya Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga</p> <p>Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Forum Anak Layanan</p> <p>Peningkatan Kualitas Hidup Anak melalui Forum Anak</p>	<p>15 Kali</p> <p>18 Forum Anak</p>	<p>14,235,400</p>	
<p>Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Bimtek Konveksi Hak Anak</p> <p>Terselenggaranya Repikasi dan Pembinaan PATBM ak (KHA)</p> <p>Terselenggaranya Sosialisasi Parenting Edukasi</p>	<p>0 Orang</p> <p>40 Orang</p> <p>0 Orang</p>	<p>9,267,400</p>
<p>Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak</p> <p>Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pokja Gugus Tugas KLA</p>	<p>65 Orang</p> <p>0 Kali</p>	<p>17,107,600</p>
<p>Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Terselenggaranya Rapat Pencapaian Implementasi Kecamatan Layak Anak</p>	<p>7 Kecamatan</p>	<p>67,267,400</p>
<p>Kegiatan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/kota</p> <p>Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Persentase pelaksanaan pengembangan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</p> <p>Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>100%</p> <p>12 Bulan</p>	<p>277,799,900</p> <p>50%</p> <p>277,799,900</p> <p>50%</p> <p>277,799,900</p>
<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>Persentase ARG di Kota Dumai</p>	<p>3187</p>	<p>277,799,900</p>
<p>Skor Pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)</p>	<p>Skor</p>	<p>3187</p>	<p>277,799,900</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

<p>Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG</p>	<p>a. Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG di seluruh perangkat daerah b. Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan</p>	<p>a. 100% b. 7 Kelurahan</p>	<p>3,044,400</p>
<p>Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota.</p>	<p>Tertaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan</p>	<p>7 kecamatan</p>	<p>122,426,200</p>
<p>Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</p>	<p>Tertaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi</p>	<p>7 kecamatan</p>	<p>122,426,200</p>
<p>Kegiatan Penguatan dan mengembangkan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota</p>	<p>Tertaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>1 kegiatan</p>	<p>88,106,300</p>
<p>Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten / Kota</p>	<p>Tertaksananya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM</p>	<p>2 kegiatan</p>	<p>88,106,300</p>
<p>Kegiatan Pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota</p>	<p>Tertaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpelah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>16,898,800</p>
<p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p>	<p>Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpelah Gender dan Anak di Kota Dumai</p>	<p>50%</p>	<p>16,898,800</p>
<p></p>	<p>Persediaan data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p>8,822,400</p>
<p></p>	<p>Tersedianya data gender di Kota Dumai</p>	<p>1 Dokumen</p>	<p></p>

ESELON III

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
ESSELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari trafik	3 = 10 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	4	5 = 12	25	25	25	25	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7 = 3 Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	8	9	10 Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	11 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	12	13 52,721,851
		Persentase administrasi keuangan perangkat Daerah	%	100	25	25	25	25					Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat Daerah	100%	4,455,770,222
		Persentase pengelolaan administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah	%	100	25	25	25	25					Kegiatan Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah	100%	8,444,000
		Persentase administrasi umum perangkat daerah	%	100	25	25	25	25					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100%	414,215,808
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	3	3	3	3					Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	819,468,000
		Terpeliharanya barang milk daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	12	3	3	3	3					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milk daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	107,170,000
JUMLAH										JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		
										5,857,789,681		5,857,789,681		5,857,789,681		

SEKRETARIS



SUWARNI, S.H., M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2022
OUTCOME
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3 = 11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20		20%			Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	20%	16,989,950	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	12 Bulan	16,989,950
2						2	1					72,100,000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	72,100,000
3												349,044,000	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	40 Layanan	349,044,000

4	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40	20%	20%	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	40%	10,007,500	Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus 12 Bulan	21 Kasus	10,007,500
5				1	2				78,350,000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	78,350,000
6				3	2				102,306,000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Bulan)	5 dokumen	102,306,000
							JUMLAH		628,797,450	Kabupaten/Kota	JUMLAH		628,797,450

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan

IRFAN WAHYUDI, SKM, M. Si
NIP. 19790402 199803 1 002

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2022
OUTCOME
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3 = 11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Dumai	%	30%					Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Dumai	30%	8,822,400	Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelebagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota	Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai	1 Dokumen	8,822,400
												8,076,400		Tersedianya profil anak dalam kelembagaan data	1 Dokumen - Tersedianya media informasi gender dan anak	8,076,400
										JUMLAH		16,898,800		JUMLAH		16,898,800

Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak



Dra. HEPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2022
OUTCOME
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program / Kegiatan	Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu		
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4										
1	Meningkatnya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	3 = 11 Meningkatnya capaian skor Kota Layak Anak	Skor	5 750	6 750	7 750	8 750	9 750	10 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	11 Meningkatnya capaian skor Kota Layak Anak > 700	12 750	13 Rp 50,999,400	14 Kegiatan pengembangan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dunia usaha kewenangan kabupatere/kota	15 Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang berperan dalam Pemenuhan Hak Anak	16 20 Lembaga	17 Rp 10,389,000		
JUMLAH															JUMLAH	Rp 50,999,400	Rp 40,610,400	Rp 50,999,400

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
dan Perlindungan Anak



Ns. SRI BULAN, S. Kep
19680414 198811 2 001

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON III TAHUN 2022

OUTCOME

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
1	Meningkatnya pelaksanaan penganusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai	4 %	5 10	6	7 10	8	9	10 Program Penganusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	12 10 %	13 Rp 277.799,900	14 Kegiatan Pelembagaan Penganusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota Kegiatan pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	15 Persentase pelembagaan Penganusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan (Kecamatan)	16 100 % 7 Kecamatan	17 Rp 87,267,400 Rp 122,426,200
											Rp 277.799,900	Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Kegiatan) Terlaksananya penguatan dan pengembangan	7 Kecamatan	Rp 88,106,300
									Jumlah		Rp 277.799,900				Rp 277.799,900

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA


SRI TRIANI INDARTI, SKM
NIP. 19661022-198911 2 001

ESSELON IV

PERUBAHAN RENCANA AKSI SEBELUM IV TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3 = 10	4	5 = 12	3	3	3	3	6	7 = 3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari linjak kekerasan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	3	3	3	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	1.340.853.868	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bln	Rp 6.591.200
2			Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Rp 90.985.550	
3		Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Rp 11.076.200	
4		Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Rp 20.441.900	
5		Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12	3	3	3	3					penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Rp 53.747.368	
6		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 7.728.000	
7		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	3	3	3	3					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 223.645.370	
8		Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat											Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Rp 198.900	
9		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	3	3	3	3					penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 122.669.100	
10		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Rp 696.600.000	
11		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Rp 62.060.000	
12		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp 13.340.000	

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON IV TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Setuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3 = 10	4	5 = 12	3	3	3	3	6	7 = 3	8	9	10	12	13	
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12					Program Penunjang Utusan Pemertintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	1.340.853.608	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Blh	Rp 6.591.200
2		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	12 Blh	Rp 90.965.550
3		Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	12 Blh	Rp 11.076.200
4		Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	3	3	3	3					Tersedianya bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 Blh	Rp 20.441.900
5		Tersedianya kebutuhan barang pengandaian	Bulan	12	3	3	3	3					penyediaan barang cetak dan pengandaian	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan pengandaian	12 Blh	Rp 53.747.368
6		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Blh	Rp 7.728.000
7		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12	3	3	3	3					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Blh	Rp 223.646.370
8		Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat											Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Blh	Rp 198.900
9		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	3	3	3	3					penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Blh	Rp 122.666.100
10		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Blh	Rp 666.600.000
11		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan prorangan Dinas atau kenderaan jabatan	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan prorangan Dinas jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan prorangan Dinas jabatan	12 Blh	Rp 82.090.000
12		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perincian kenderaan dinas operasional atau	Bulan	12	3	3	3	3					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perincian kenderaan dinas operasional atau	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perincian kenderaan dinas operasional atau	12 Blh	Rp 13.340.000

13	Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	3	-	3	3	3			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bln	Rp	5.030,000
14	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	10								Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10 Unit	Rp	6.710,000
JUMLAH											JUMLAH	JUMLAH	1,340,853,608	1,340,853,608	

KASUBBAG TATA USAHA



LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200504 2 021

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELON IV TAHUN 2022
OUTPUT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 Kasus	5 21	6 21	7	8	9	10 Perlindungan khusus anak	11 Meningkatnya perlindungan khusus anak	12 40%	13 10,007,500	14 Kegiatan Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	15 Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	16 21 kasus	17 10,007,500
									JUMLAH	JUMLAH		10,007,500	JUMLAH			10,007,500

Kepala LPT PPA



FAJARIA RUSMEITY, SKM
NIP. 19780524 200501 2 007

PERUBAHAN RENCANA AKSI ESELION IV TAHUN 2022
OUTPUT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 dokumen	5	6	7	8	9	10 Perlindungan khusus anak	11 Meningkatnya perlindungan khusus anak	12 5 dokumen	13 102,306,000	14 Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota	15 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kabupaten/kota	16 5 dokumen	17 102,306,000
JUMLAH										JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		
										102,306,000		102,306,000		102,306,000		

Kepala Subbag TU UPT PPA



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2	3 = 10	4	5 = 12					6	7 = 3	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	1				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	52,721,851	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	19,509,124	
2		Jumlah dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1								Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	4,639,739	
3		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	Dokumen	1		1							Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	2,801,539	
4		Jumlah dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1								Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	2,029,608	
5		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	Dokumen	1			1						Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1,202,394	
6		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD	Dokumen	2	2								Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD	2 Dokumen	15,213,947	
7		Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	Dokumen	3	3								Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	3 Dokumen	7,325,500	
JUMLAH										JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
										52,721,851		52,721,851		52,721,851		52,721,851	

PERENCANA AHLI MUJDA


NETTY LINDAWATI, S. SI, T. M. IP
NIR. 19730229 199201 2 001

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu			
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4										
1	2	3 = 15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM	Orang	40		20	10	10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Capaian Skor kota layak Anak	>700	Rp 19,656,400	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM	40	Rp 10,389,000		
		Terselenggaranya penguatan Informasi Layak anak	Orang	25				25					Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Informasi Layak Anak (ILA)	25	Rp 9,267,400		
JUMLAH															JUMLAH	JUMLAH	Rp 19,656,400	Rp 19,656,400

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Dra. SURNIATI

NIP. 19661222 199401 2 001

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu		
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4										
1	2	3 = 15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga	Kali	15	5		10		Program pemenuhan hak anak (PHA)	Meningkatnya capaian skor kota layak anak	>700	Rp 14.235,400	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga	15 kali	Rp 14.235,400		
		Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak	Forum Anak	18		10	8						Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak	18 Forum Anak				
JUMLAH													JUMLAH		Rp 14,235,400	JUMLAH		Rp 14,235,400

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA


dr. DEVI DIANNY, M. K. M
NIP. 19750313 201001 2 011

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
1	2	3 = 15	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dan tidak kekerasan	Terselenggaranya lembaga yang ramah anak	Lembaga	20	20				Meningkatnya Capaian Skor Kota Layak Anak	> 700	Rp 27,496,600	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan	Terselenggaranya lembaga yang ramah anak	20 Lembaga	Rp 10,389,000
		Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak	Orang	65	65							Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota Layak Anak	65 Orang	Rp 17,107,600
		Terselenggaranya rapat penciptaan implementasi Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	7	7								Terselenggaranya rapat penciptaan implementasi Kecamatan Layak Anak	7 Kecamatan	
JUMLAH													JUMLAH	Rp 27,496,600	Rp 27,496,600

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dan tindak kekerasan	3 = 15 Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 dokumen	5 5	6	7	8	9	10 Program Perlindungan khusus anak	11 Meningkatnya Perlindungan khusus anak	12 40%	13 Rp102.306.000	14 Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	15 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	16 5 dokumen	17 Rp102.306.000
JUMLAH											Rp102.306.000	JUMLAH			Rp102.306.000	

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

Ns. ISNA MIARTI, S. Kep
NIP. 19750805 200312 2 011

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan Kegiatan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan penganusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Tertaksananya Pengembangan KIE dalam meningkatkan kapasitas SDM	4 Kegiatan	2	6	7	8	9	Program Penganusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai	12 10%	13 Rp88,106,300	14 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Perempuan kabupaten/kota	15 Tertaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	16 2 Kegiatan	17 Rp88,106,300
															JUMLAH	Rp88,106,300
										JUMLAH					JUMLAH	Rp88,106,300

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



AKMALIA YARNELINUR, SKM
NIP. 19821123 20501 2 004

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUNAN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Terlaksananya koordinasi dan inkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	4 Bulan	5 12	3	3	3	3	10 Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan	12 10 %	13 Rp67,267,400	14 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	15 Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	16 Bulan	17 Rp64,223,000
		Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh Peragkat Daerah	%	100				100				Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh daerah	100 %	Rp3,044,400
									JUMLAH		Rp67,267,400		JUMLAH		Rp67,267,400

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

DEWI YASMANIDAR, SKM
NIP. 19690826 199303 2 004

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	4 Kecamatan	5 7	6 7	7 8	9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	11 Persentase ARG di Kota Dumai	12 10%	13 Rp 122.426.200	14 Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PLUG termasuk PPRG	15 Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	16 7 Kecamatan	17 Rp 122.426.200	
JUMLAH											Rp 122.426.200	JUMLAH			Rp 122.426.200	

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


NOVA KURNIASARI, SE
NIP: 19721102 200604 2 001

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan penganusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan tindak anak dan tindak kekerasan	3 = 15 1. Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai 2. Tersedianya data gender di kota Dumai	4 Dokumen	5 1	6 1	7	8	9	Program Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak.	12 30%	13 Rp8,822,400	14 Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota	15 1. Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai 2. Tersedianya data gender di kota Dumai	16 1 Dokumen	17 Rp8,822,400
JUMLAH											Rp8,822,400	JUMLAH			Rp8,822,400	

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA


Dra. Nibodiaty

NIP. 19691015 199503 2 005

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 a. Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai b. Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai c. Tersedianya media informasi gender dan anak	5 1 Dokumen 1 Dokumen 3 jenis media	6	7	8	9	10 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	11 Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Dumai	12 30%	13 8,076,400	14 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kota Dumai Kewenangan Kabupaten / Kota	15 a. Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai b. Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai c. Tersedianya media informasi gender dan anak	16 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Jenis Media	17 8,076,400
JUMLAH											JUMLAH	JUMLAH	8,076,400	8,076,400	

Pihak Pertama
Analisis Kebijakan Ahli Muda

SRI DUMAYATI, A.Md
NIP.19710128 200003 2 006

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai	Dokumen	1		1			Pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak	25%	Rp 8,822,400	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi anak di Kota Dumai	1 dokumen	Rp 8,822,400	
		Tersedianya data gende di Kota Dumai	Dokumen	1		1								Tersedianya data gender di Kota Dumai	1 dokumen		
JUMLAH										JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH		JUMLAH	
										Rp 8,822,400		Rp 8,822,400		Rp 8,822,400		Rp 8,822,400	

Analisis Kebijakan Ahli Muda



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
NIP. 19780430 200003 2 004

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4									
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen	5 3	6 2	7 1	8 1	9 1	10 Program perlindungan Perempuan	11 Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	12 20%	13 Rp 89.089,950	14 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksana kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15 Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	16 3 dokumen	17 Rp 72.100,000
		Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan	Kecamatan	7		7						Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan	7 Kecamatan	Rp 16,989,950		
		Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui pidana perdagangan orang	Kecamatan	7		7						Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui pidana perdagangan orang	7 Kecamatan			
				JUMLAH							Rp 89,089,950		JUMLAH		Rp 89,089,950	

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN HAMELDI AST
NIP.19780308.200312.2.005

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Indikator Program	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target	Pagu	
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya pelaksanaannya penganusutamaa n gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 = 15 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	5 3	6	7	8	9	10 Program Perlindungan perempuan	11 Meningkatnya Perlindungan bagi perempuan	12 20%	13 72,100,000	14 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	15 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	16 3 dokumen	17 72,100,000
JUMLAH													JUMLAH	72,100,000		

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. S0s, M.Si
NIP. 19790826 200604 2 005

PERUBAHAN RENCANA AKSI TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Pagu	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	2	3 = 10	4	5 = 12					6	7 = 3	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	3	4	4	3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	100%	4,455,770,222	Perediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,445,616,222
2		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	2				2					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	10,154,000
3		Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	Dokumen	2				2								
JUMLAH											4,455,770,222	JUMLAH				4,455,770,222

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA



YUNI WEKDA, SE

NIP. 19770614 200501 2 008

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DARI
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

ESSELON II

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart Skor pencapaian Kota Layak Anak Skor pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)	91	95	95	95	95	95
			650	700	750	800	850	900
			2512	3187	3862	3870	4000	4300

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA



MAINI ASNA, SKM, M. Si

NIP. 19680529 198603 2 002

ESSELON III

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2022
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>%</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>100</p>

Dumai, 7 Oktober 2022
SEKRETARIS,



SUWARNI, SH, M.Si
NIP. 19650930 198603 2 005

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
<p>Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak di Kota Dumai - Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai - Tersedianya data gender dan anak di kota Dumai 	%	30

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA BIDANG
DATA DAN INFORMASI GENDER DAN ANAK



Dra. HEPI SYURYANI
NIP. 19650930 199003 2 004

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai	(3) %	(4) 10

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA BIDANG PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA



SRI TRIANI INDARI, SKM
NIP.19691022 198911 2 001

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya capaian skor Kota Layak Anak	Skor	750

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK



SRI BULAN, S. Kep
NIP. 19680414 198811 2 001

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
ESELON III
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

Sasaran Strategis	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan	%	20
	Meningkatnya perlindungan khusus anak	%	40

Dumai, 7 Oktober 2022
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN



IRFAN WAHYUDI, SKM, M.Kes
NIP.19790402 199803 1 002

ESSELON IV

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Jumlah pengaduaan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	(3) Kasus	(4) 21

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA UPT DPPP



FAJARIA RUSMEITY, SKM
 NIP. 19780524 200501 2 007

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	(3) kasus	(4) 21

Dumai, 7 Oktober 2022

KEPALA SUBBAG TU UPT DPPP



RESTI EKO YULIANTI, AMK
NIP. 19800725 200604 2 017

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022 ESSELON IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12
2		Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	12
3		Tersedianya peralatan Rumah Tangga	Bulan	12
4		Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12
5		Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Bulan	12
6		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12
7		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan	12
8		Tertaksananya penyediaan jasa sural menyurat	Bulan	12
9		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12
10		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12
11		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Bulan	12
12		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Bulan	12
13		Tersedianya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12
14		Tersedianya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Bulan	12

KASUBBAG TATA USAHA

LILI KURNIATI, S. Tr. Keb
NIP. 19770727 200604 2 021

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahunan 2022
1	2 Sasaran : Meningkatkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	11 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen RKA SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	13 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen

PERENCANA AHLI MUDA



NETTY LINDAWATI, S. Si. T, M. IP
NIR. 19720229 199201 2 001

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sub Kegiatan	Target Tahunan 2022
1	2 Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	3 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan inventarisasi aset	4 14 Bulan 2 Dokumen 2 Dokumen

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA



YUNI WELDA, SE

NIP. 19770614 200501 2 008

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai Tersedianya data gender di kota Dumai	(3) Dokumen Dokumen	(4) 1 1

Analisis Kebijakan Ahli Muda



Dra. NURMIATI

NIP. 19691015 199503 2 005

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai Tersedianya media informasi gender dan anak	(3) Dokumen Dokumen Jenis media	(4) 1 1 3

Dumai, 7 Oktober 2022
Analisis Kebijakan Ahli Muda



SRI DUMAYATI, A.Md
NIP. 19710128 200003 2 006

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
 OUTPUT
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) a. Tersedianya data gender dikota Dumai b. Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai	(3) Dokumen Dokumen	(4) 1 1

Analisis Kebijakan Kebijakan Ahli Muda



WAN ANNA FITRIYAH, SKM
 NIP. 19780430 200003 2 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) a. Teerlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota b. Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh Perangkat Daerah	(3) Bulan %	(4) 12 100

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



DEWI YUSMAINIDAR, SKM
 NIP. 19690826 199303 2 004

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	(3) Kecamatan	(4) 7

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



NOVA KURNIASARY, SE
NIP. 19721102 200604 2 011

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembagian serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Terlaksananya pengembangan KIE dalam meningkatkan kapasitas SDM	(3) Kegiatan	(4) 2

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

 AKMALIA YARNELINUR, SKM
 NIP. 19821123 200501 2 004

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) 1. Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM 2. Terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA)	(3) Orang Orang	(4) 40 25

Dumai, 7 Oktober 2022
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Dra. SURNIATI
NIP. 19661222 199401 2 001

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) a. Terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga b. Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui Forum Anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui Forum Anak	(3) Kali Forum Anak	(4) 15 18

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



dr. DEVY DIANNY, M.K.M
NIP.19750313 201001 2 011

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Sub Kegiatan (2)	Satuan (3)	Target Tahunan 2022 (4)
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Lembaga yang ramah anak 2. Terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas Kota layak Anak 3. Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi Kacamatan layak Anak 	<p>lembaga</p> <p>Orang</p> <p>Kecamatan</p>	<p>20</p> <p>65</p> <p>7</p>

Dumai, 7 Oktober 2022

PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA



Ns. KOMALA SARI, S.Kep. M. K. M
NIP. 19780418 200501 2 007

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	(3) dokumen	(4) 3

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



MURNI ASNITA, S. S0s, M.Si
 NIP. 19790826 200604 2 005

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) a. Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan b. Terselenggaranya penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang c. Terselenggaranya penguatan jejaring antar Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	(3) dokumen kecamatan Kecamatan	(4) 3 7 7

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



WAN HAMELIDA, SST
NIP. 197803082003122005

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
OUTPUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan 2022
(1) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	(2) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	(3) Dokumen	(4) 5

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



Ns. ISRAMIARTI, S.Kep
 NIP.197508052003122011

**EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI
DARI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

EVALUASI BERKALA RENCANA AKSI DARI PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target / Realisasi												Penanggung Jawab		
					Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4				Realisasi Tahun 2022	%
					Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapat Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standart Skor Pencapaian Kota Layak Anak	%	95%	95%	100%	105,3	95%	100%	105,3	95%	100%	105,3	95%	100%	105,3	100%	105,3	Kepala Dinas
		Skor Pencapaian Kota Layak Anak	Skor	700	0	0	#VALUE!	700	703,5	100,5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	703,5	100,5	Kepala Dinas
		Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	3187	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	3187	3862,5	121,2	3862,5	121,2	Kepala Dinas



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai
DUMAI – RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
Nomor : 20/SK/DPPPA/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DUMAI

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan yang telah ditetapkan . Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang selaras dengan Indikator Kinerja Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA, disusun dengan mengacu kepada kewenangan, tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal, 16 September 2021

An. WALIKOTA DUMAI,

PIT. KEPALA



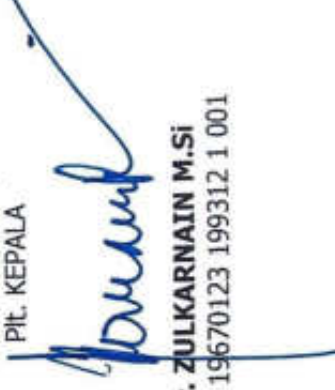
Ir. ZULKARNAIN M.Si
NIP. 19670123 199312 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : 20 / SK / DPPP/ 2021
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender Serta Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak di Kota Dumai	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar	%	91	95	95	95	95	95
Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan	Skor Pencapaian Kota Layak Anak Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	SKOR SKOR	650 2512	700 3187	750 3862	800 3870	850 4000	900 4300

Ditetapkan di Dumai
 Pada tanggal, 16 September 2021
 An. WALIKOTA DUMAI,

PIH. KEPALA

 Ir. ZULKARNAIN M.Si
 NIP. 19670123 199312 1 001

Revisi Persepsi Layanan Publik Kepada Staf Persepsi Kerja Kelangkaan yang memuat Kerangka
Referensi: "Trenografi Layanan Publik" dan "Kerangka Kerja Trenografi Kerangka

INDONESIA DITPUP	SALINAN		KONDISI INDIKATOR			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trenografi Layanan Publik Kepada Staf Persepsi Kerja Kelangkaan yang memuat Kerangka Referensi	1	1	1	1	1	1

Persepsi Layanan Publik Kepada Staf Persepsi Kerja Kelangkaan yang memuat Kerangka
Referensi: "Trenografi Layanan Publik" dan "Kerangka Kerja Trenografi Kerangka

INDONESIA DITPUP	SALINAN		KONDISI INDIKATOR			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Trenografi Layanan Publik Kepada Staf Persepsi Kerja Kelangkaan yang memuat Kerangka Referensi	0	0	0	0	0	0
Trenografi Layanan Publik Kepada Staf Persepsi Kerja Kelangkaan yang memuat Kerangka Referensi	0	0	0	0	0	0

DMIA, 16 SEPTEMBER 2021